



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Akta Perusahaan dan Pengesahan
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
5. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik
6. Sertifikat Tenaga Ahli
7. Fotocopy sewa kontrak tempat
8. Surat pernyataan memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi
9. Fotocopy Surat Izin yang dimiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Image not found or type unknown



1. Memberikan layanan informasi perizinan
2. Menerima berkas dan meneliti berkas permohonan
3. Memverifikasi berkas permohonan dan KSWP
4. Penilaian dan Kunjungan lapangan
5. Penyusunan Rekomendasi teknis
6. Pembuatan naskah persetujuan komitmen
7. Penelitian dan Paraf
8. Penandatanganan surat persetujuan komitmen
9. Penomoran dan pencatatan
10. Notifikasi OSS
11. Penyerahan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak pengaduan, saran dan masukan
3. Email : dppm@jogjaprov.go.id
4. SMS/Telepon : 081228406644, 0274.4538737
5. Rapat koordinasi dengan SKPD/PD terkait